

DOKUMEN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA GAGASAN PENDIRI NEGARA TENTANG DASAR NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pentingnya Dasar Negara

Setiap entitas politik yang bernama negara, untuk dapat berdiri tegak, berdaulat, dan melangkah maju menuju cita-cita luhurnya, mutlak memerlukan sebuah fondasi ideologis yang kokoh. Fondasi inilah yang kita kenal sebagai dasar negara. Dasar negara bukan sekadar kumpulan pasal-pasal hukum atau norma-norma belaka; ia adalah cerminan jiwa bangsa, kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini bersama, serta kompas moral yang menuntun arah perjalanan sebuah peradaban. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila, sebuah filosofi hidup yang telah teruji dalam berbagai dinamika sejarah. Memahami Pancasila secara mendalam, khususnya melalui penelusuran gagasan-gagasan para pendiri bangsa, adalah sebuah keharusan. Ini bukan hanya tentang menghafal butir-butir sila, melainkan tentang menyelami kedalaman pemikiran, pergolakan batin, dan visi jauh ke depan yang dimiliki oleh para tokoh besar di balik kelahirannya. Pengetahuan ini membekali kita dengan pemahaman yang utuh mengenai mengapa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi bangsa yang majemuk ini, serta bagaimana semangat perjuangan dan komitmen kebangsaan terangkum dalam setiap silanya. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang dan proses perumusan dasar negara, apresiasi kita terhadap Pancasila akan terasa dangkal, dan kita akan kesulitan untuk mengimplementasikannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Kontekstualisasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam Topik Ini

Dalam konteks kurikulum Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), materi mengenai gagasan pendiri negara tentang dasar negara ini tidak hanya bertujuan agar peserta didik sekadar tahu atau hafal nama-nama tokoh dan butir-butir gagasan mereka. Lebih dari itu, pembelajaran ini didesain untuk mendorong peserta didik melakukan eksplorasi, analisis kritis, sintesis informasi, dan refleksi personal yang mendalam. Pembelajaran mendalam menuntut peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, mengaitkan, dan membangun pemahaman mereka sendiri atas kompleksitas sejarah dan filosofi di balik Pancasila.

Kita akan mengajak peserta didik untuk:

1. Menggali lebih jauh konteks historis dan sosiologis saat gagasan-gagasan itu dilontarkan. Apa tantangan utama saat itu? Bagaimana kondisi masyarakat? Apa aspirasi yang ingin diwujudkan?

2. Menganalisis perbandingan antara gagasan satu tokoh dengan tokoh lainnya. Apa persamaan dan perbedaannya? Mengapa perbedaan itu muncul? Bagaimana perbedaan tersebut akhirnya dapat disatukan dalam sebuah sintesis yang harmonis?
3. Memahami setiap sila bukan sebagai dogma yang statis, melainkan sebagai sebuah konsep hidup yang dinamis, kaya makna, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai fundamental.
4. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pemahaman akar sejarahnya, sehingga peserta didik tidak hanya memahami Pancasila secara kognitif, tetapi juga merasakannya secara afektif dan terdorong untuk mengamalkannya secara psikomotorik.
5. Melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti evaluasi, analisis, dan penciptaan, yang merupakan inti dari pembelajaran mendalam. Ini termasuk kemampuan untuk melihat relevansi Pancasila dalam isu-isu kontemporer dan merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran mendalam ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan secara komprehensif gagasan-gagasan fundamental dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengenai dasar negara Indonesia, beserta konteks historis dan filosofis di baliknya.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara ketiga gagasan tersebut, serta memahami bagaimana proses dialektika pemikiran tersebut akhirnya mengerucut menjadi rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang.
3. Menjelaskan kronologi perumusan dasar negara dari sidang BPUPKI hingga penetapan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peran penting Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta.
4. Menginternalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta menunjukkan sikap apresiasi dan bangga terhadap warisan pemikiran para pendiri bangsa.
5. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, serta memiliki kesadaran kritis untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila dari berbagai ancaman dan tantangan.
6. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, kritis, dan reflektif dalam memahami sejarah perumusan dasar negara, serta mampu mengaitkannya dengan isu-isu kebangsaan masa kini.

II. SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) SEBAGAI ARENA GAGASAN

A. Pembentukan BPUPKI dan Mandatnya

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan singkatan BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai dalam bahasa Jepang), merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI ini bukan tanpa motif politik tertentu dari Jepang. Kala itu, Jepang berada dalam posisi terdesak dalam Perang Dunia II dan membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia. Sebagai upaya menarik simpati dan dukungan, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. BPUPKI dibentuk sebagai realisasi janji tersebut, meskipun janji itu sejatinya adalah strategi Jepang untuk mempertahankan kepentingannya di Asia Tenggara.

Terlepas dari motif Jepang, bagi para pemimpin bangsa Indonesia, pembentukan BPUPKI adalah sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Ini adalah forum resmi pertama di mana para pemimpin bangsa dapat secara terbuka dan terstruktur membahas persiapan kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, dengan wakil ketua R.P. Suroso dari Indonesia dan Ichibangase Yosio dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang dari berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan di Indonesia, ditambah 7 orang anggota perwakilan Jepang.

Mandat utama BPUPKI sangat jelas dan krusial, yakni "menyelidiki dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi pembentukan negara Indonesia merdeka". Dalam konteks ini, "segala sesuatu" mencakup aspek-aspek fundamental seperti dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan berbagai hal lain yang esensial untuk sebuah negara berdaulat. Dari berbagai agenda tersebut, perumusan dasar negara menjadi salah satu bahasan paling sentral dan mendesak, karena dasar negara akan menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan didirikan.

B. Suasana Kebatinan dan Tantangan Saat Itu

Sidang-sidang BPUPKI, khususnya sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berlangsung dalam suasana yang penuh dengan dinamika, ketegangan, namun juga semangat kebangsaan yang membara. Suasana kebatinan para anggota BPUPKI saat itu adalah perpaduan antara optimisme akan kemerdekaan yang sebentar lagi akan diraih, namun juga dibayangi oleh ketidakpastian dan tantangan yang sangat besar.

Beberapa poin penting mengenai suasana kebatinan dan tantangan tersebut adalah:

1. Semangat Persatuan di Tengah Keberagaman: Anggota BPUPKI berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, adat istiadat, dan ideologi. Ada golongan nasionalis sekuler, nasionalis Islam, sosialis, dan lain-lain. Menyatukan visi dan misi di tengah keberagaman yang begitu kaya adalah tantangan tersendiri. Namun, semangat untuk mewujudkan Indonesia merdeka menjadi perekat utama yang mengalahkan perbedaan-perbedaan tersebut.
2. Desakan Waktu dan Tekanan Sejarah: Para anggota BPUPKI menyadari bahwa kesempatan untuk merumuskan fondasi negara ini mungkin tidak datang dua kali. Ada desakan untuk segera menyelesaikan tugas, mengingat situasi perang yang terus berubah dan kemungkinan kekalahan Jepang yang semakin nyata. Mereka harus bekerja cepat namun tetap dengan pemikiran yang matang dan visioner.
3. Pencarian Identitas Bangsa yang Baru: Setelah ratusan tahun di bawah penjajahan, bangsa Indonesia akan segera memiliki identitas dan kedaulatan sendiri. Pertanyaan mendasar muncul: "Seperti apakah Indonesia merdeka itu?" "Apa yang akan menjadi ciri khas dan pembeda kita dari bangsa lain?" Dasar negara harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental ini.
4. Perdebatan Ideologis yang Sengit: Meskipun ada semangat persatuan, perdebatan ideologis tentang bentuk dan dasar negara tidak dapat dihindari. Beberapa anggota menginginkan negara Islam, sebagian lain menginginkan negara sekuler, dan ada pula yang mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi semua golongan. Ini adalah perdebatan yang sangat sensitif namun esensial, karena menyangkut masa depan bangsa.
5. Visi Jangka Panjang: Para pendiri bangsa tidak hanya berpikir tentang kemerdekaan sesaat, tetapi juga tentang bagaimana negara ini akan bertahan ribuan tahun ke depan. Dasar negara yang dirumuskan haruslah sebuah konsep yang lestari, relevan sepanjang masa, dan mampu menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Keterbatasan Sumber Daya dan Kondisi Perang: Sidang-sidang berlangsung di tengah kondisi perang, dengan segala keterbatasan logistik dan informasi. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat para anggota untuk memberikan sumbangsih pemikiran terbaik mereka.

Dalam suasana inilah, tiga tokoh besar, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang mereka tentang dasar negara, yang kelak akan menjadi tonggak sejarah perumusan Pancasila.

III. GAGASAN MUHAMMAD YAMIN TENTANG DASAR NEGARA

A. Biografi Singkat dan Peran Penting Muhammad Yamin

Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah perumusan dasar negara. Lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903, Yamin dikenal sebagai seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang brilian. Pendidikan beliau yang luas, termasuk di bidang hukum (Rechtshogeschool di Jakarta), membentuknya menjadi seorang intelektual yang memiliki pemikiran tajam dan wawasan yang sangat luas.

Peran penting Muhammad Yamin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Beliau aktif dalam berbagai organisasi pemuda dan pergerakan nasional sejak usia muda. Salah satu kontribusi monumental beliau adalah saat Kongres Pemuda II pada tahun 1928, di mana ia merumuskan ikrar Sumpah Pemuda yang mengukuhkan semangat persatuan bangsa. Sebagai seorang ahli hukum dan politik, Yamin memiliki kemampuan orasi dan argumentasi yang sangat kuat, serta kemampuan untuk merangkum gagasan-gagasan besar ke dalam rumusan yang padat dan mudah dipahami. Kecintaannya pada sejarah dan kebudayaan Indonesia juga sangat mendalam, yang tercermin dalam banyak karya sastra dan pemikirannya tentang kebangsaan. Dalam konteks BPUPKI, Yamin adalah salah satu anggota yang paling aktif dan vokal dalam menyampaikan gagasan-gagasan fundamental mengenai fondasi negara yang akan didirikan.

B. Penyampaian Gagasan pada Sidang BPUPKI Tanggal 29 Mei 1945

Muhammad Yamin adalah pembicara pertama yang menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada Sidang BPUPKI yang bersejarah, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan gagasannya dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Kedua bentuk penyampaian ini memiliki rumusan yang sedikit berbeda namun esensinya tetap sama, yaitu lima prinsip dasar yang diharapkan menjadi fondasi bagi negara Indonesia merdeka.

1. Secara Lisan

Dalam pidatonya yang menggelegar, Muhammad Yamin mengemukakan lima asas dasar negara yang ia sebut sebagai "lima dasar untuk Indonesia Merdeka". Asas-asas ini mencerminkan pandangan beliau tentang identitas bangsa Indonesia yang kaya dan kompleks, serta cita-cita luhur yang harus diwujudkan dalam sebuah negara berdaulat.

a. Peri Kebangsaan

Prinsip "Peri Kebangsaan" yang disampaikan oleh Muhammad Yamin menyoroti pentingnya semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas kebangsaan yang kuat sebagai fondasi negara. Yamin menekankan bahwa negara Indonesia harus dibangun di atas rasa persatuan dan kebanggaan akan tanah air, bahasa, dan budaya yang sama. Ini bukan nasionalisme yang sempit atau chauvinistik, melainkan nasionalisme yang inklusif, merangkul seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Peri Kebangsaan ini menjadi semangat pengikat yang menyatukan berbagai etnis dan budaya di Nusantara menjadi satu entitas politik yang mandiri dan berdaulat. Yamin melihat kebangsaan sebagai jiwa yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan dan akan menjadi perekat utama dalam menjaga keutuhan negara di masa depan.

b. Peri Kemanusiaan

Asas "Peri Kemanusiaan" menegaskan bahwa negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan, dan peradaban. Yamin berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada pembebasan dari penjajahan, tetapi harus diiringi dengan penghormatan terhadap martabat setiap individu manusia. Ini berarti negara harus menjamin hak-hak asasi manusia, memperlakukan setiap warga negara secara adil, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Peri Kemanusiaan ini juga mencerminkan pandangan bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari keluarga besar umat manusia, sehingga harus mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan keadilan sosial menjadi inti dari prinsip ini.

c. Peri Ketuhanan

"Peri Ketuhanan" adalah asas yang mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kekuasaan dan kebaikan. Yamin menyadari bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah penganut agama dan kepercayaan yang kuat. Oleh karena itu, negara tidak boleh anti-agama, melainkan harus memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Namun, Peri Ketuhanan ini bukan berarti negara harus berbentuk negara agama tertentu, melainkan negara yang berketuhanan, yang menjamin kebebasan beragama dan tidak memaksakan satu agama pun kepada warganya. Ini adalah konsep ketuhanan yang berlandaskan

moralitas dan etika, di mana nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. Peri Kerakyatan

Asas "Peri Kerakyatan" menekankan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Yamin membayangkan sebuah negara yang demokratis, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bukan melalui kekuatan atau dominasi golongan tertentu. Prinsip ini mencerminkan semangat anti-otoritarianisme dan penindasan yang telah dialami selama masa penjajahan. Negara harus menjadi representasi kehendak rakyat, dan setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik. Peri Kerakyatan ini juga mengandung makna bahwa pemimpin negara haruslah pemimpin yang melayani rakyat, bukan sebaliknya.

e. Kesejahteraan Rakyat

Terakhir, "Kesejahteraan Rakyat" adalah asas yang menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Yamin menyadari bahwa kemerdekaan tidak akan berarti jika rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara harus memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang menjamin pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Prinsip ini adalah antitesis dari sistem eksploitasi kolonial yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan akhir dari pembangunan negara.

2. Secara Tertulis (Konsep Piagam Jakarta Awal)

Selain pidato lisan, Muhammad Yamin juga menyerahkan sebuah rumusan tertulis yang berisi lima asas dasar negara. Rumusan ini, meskipun sedikit berbeda dalam redaksi, memiliki esensi yang sama dengan gagasan lisan beliau. Rumusan tertulis ini kemudian menjadi cikal bakal dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Rumusan tertulis ini menempatkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai prinsip pertama. Frasa ini lebih spesifik dan lugas dibandingkan "Peri Ketuhanan". Ini menunjukkan pengakuan yang kuat terhadap keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang patut disembah dan menjadi sumber moralitas. Meskipun demikian, frasa ini tetap bersifat inklusif, tidak mengacu pada satu agama tertentu,

melainkan pada konsep monoteisme yang dianut oleh banyak agama di Indonesia. Prinsip ini menjadi landasan etis dan spiritual bagi kehidupan bernegara.

b. Kebangsaan Persatuan Indonesia

"Kebangsaan Persatuan Indonesia" adalah rumusan yang lebih eksplisit dari "Peri Kebangsaan". Frasa ini menekankan dua aspek penting: identitas kebangsaan Indonesia dan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Yamin membayangkan sebuah bangsa yang bersatu padu, melampaui sekat-sekat kesukuan dan kedaerahan, untuk membentuk satu kesatuan politik yang utuh dan kuat. Persatuan ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

c. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip "Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" adalah pengembangan dari "Peri Kemanusiaan". Penambahan kata "adil dan beradab" memberikan penekanan pada kualitas kemanusiaan yang diharapkan. Kemanusiaan bukan sekadar pengakuan atas keberadaan manusia, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang adil, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan peradaban. Ini berarti negara harus memastikan keadilan bagi setiap warga negara dan mendidik bangsanya agar memiliki perilaku yang beradab dalam interaksi sosial.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Rumusan ini adalah penjabaran yang sangat detail dari "Peri Kerakyatan". Yamin tidak hanya menginginkan kerakyatan atau demokrasi, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh "hikmat kebijaksanaan" melalui "permusyawaratan perwakilan". Ini menunjukkan visi demokrasi Indonesia yang khas, yang mengedepankan musyawarah mufakat, bukan sekadar voting mayoritas. "Hikmat kebijaksanaan" menyiratkan bahwa keputusan-keputusan negara harus diambil dengan pertimbangan yang matang, berdasarkan akal sehat, hati nurani, dan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan atau individu semata. "Permusyawaratan perwakilan" menegaskan bahwa demokrasi akan dijalankan melalui lembaga perwakilan rakyat.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip terakhir ini adalah pengembangan dari "Kesejahteraan Rakyat". Penambahan frasa "bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menekankan bahwa keadilan sosial harus merata dan dinikmati oleh

setiap individu tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga pelosok desa. Ini adalah komitmen negara untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan segala bentuk ketidakadilan, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.

C. Analisis Mendalam atas Gagasan Yamin dan Relevansinya

Gagasan Muhammad Yamin tentang dasar negara menunjukkan visi yang sangat komprehensif dan jauh ke depan. Lima asas yang ia sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, mencerminkan pemahaman mendalam beliau tentang karakteristik bangsa Indonesia serta tantangan yang akan dihadapi oleh negara baru.

1. **Konsistensi dan Kelengkapan:** Gagasan Yamin, meskipun disampaikan dalam dua bentuk yang sedikit berbeda redaksinya, menunjukkan konsistensi pada lima pilar utama: ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini adalah paket lengkap yang mencakup dimensi spiritual, politik, sosial, dan ekonomi. Beliau berhasil merangkum inti sari dari aspirasi bangsa Indonesia yang majemuk.
2. **Inklusivitas:** Meskipun Yamin adalah seorang Muslim yang taat, rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa-nya bersifat inklusif, mampu menaungi berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Konsep kebangsaan yang ia tawarkan juga merangkul seluruh elemen bangsa, bukan hanya kelompok tertentu.
3. **Visi Demokrasi yang Khas:** Konsep "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" menunjukkan bahwa Yamin tidak sekadar mengadopsi demokrasi Barat, tetapi mencoba merumuskan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Ini adalah wujud kearifan lokal yang diangkat ke tingkat kenegaraan.
4. **Penekanan pada Keadilan Sosial:** Yamin sangat menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya memikirkan kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Negara harus hadir untuk menjamin pemerataan dan keadilan.
5. **Relevansi Masa Kini:** Gagasan Yamin tetap sangat relevan hingga saat ini. Semangat kebangsaan dan persatuan tetap menjadi fondasi utama NKRI. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi melalui musyawarah masih menjadi pilar penting dalam kehidupan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar moral bagi setiap tindakan dan kebijakan.

Gagasan Muhammad Yamin adalah salah satu sumbangsih pemikiran paling awal dan paling berharga dalam proses perumusan dasar negara. Meskipun pada akhirnya rumusan Pancasila yang disepakati mengalami penyempurnaan, jejak pemikiran Yamin sangat jelas terlihat dalam butir-

butir Pancasila yang kita kenal sekarang. Beliau telah meletakkan fondasi awal yang kokoh bagi perdebatan dan perumusan selanjutnya.

IV. GAGASAN SUPOMO TENTANG DASAR NEGARA

A. Biografi Singkat dan Peran Penting Supomo

Supomo adalah salah satu putra terbaik bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Januari 1903. Supomo dikenal sebagai seorang ahli hukum terkemuka, terutama di bidang hukum adat dan tata negara. Pendidikan beliau yang tinggi, termasuk di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda, di mana ia meraih gelar doktor hukum, menjadikannya seorang pakar hukum yang diakui secara internasional.

Sebelum kemerdekaan, Supomo telah banyak berkiprah dalam bidang hukum dan pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berbagai jabatan penting lainnya. Keahliannya dalam hukum adat memberinya pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Dalam konteks BPUPKI, Supomo dipercaya sebagai anggota dan kemudian menjadi ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Peran beliau sangat vital dalam memberikan landasan teoritis dan filosofis bagi bentuk negara Indonesia yang akan didirikan, terutama melalui gagasannya tentang negara integralistik. Pemikiran Supomo memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyusunan UUD 1945, khususnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara.

B. Penyampaian Gagasan pada Sidang BPUPKI Tanggal 31 Mei 1945

Pada tanggal 31 Mei 1945, dua hari setelah Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya, giliran Supomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Pidato Supomo sangat bernas dan filosofis, menyoroti pentingnya sebuah konsep negara yang utuh dan menyeluruh, yang ia seistilahkan sebagai "negara integralistik".

1. Teori Negara Integralistik

Inti dari gagasan Supomo adalah konsep "negara integralistik". Menurut Supomo, negara integralistik adalah negara yang tidak memisahkan antara individu dan masyarakat, antara pemimpin dan rakyat, atau antara golongan satu dengan golongan lainnya. Sebaliknya, negara dipandang sebagai sebuah kesatuan organik yang utuh, di mana semua elemen saling terkait, saling membutuhkan, dan saling menopang demi mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat.

Beberapa ciri utama teori negara integralistik Supomo adalah:

- a. Menolak Individualisme dan Liberalisme: Supomo mengkritik konsep negara liberal yang terlalu menekankan hak-hak individu dan memisahkan negara dari masyarakat. Baginya, kebebasan individu harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama.
- b. Menolak Paham Kelas dan Totalitarianisme: Supomo juga menolak paham negara kelas seperti komunisme yang memecah belah masyarakat berdasarkan kelas, atau totalitarianisme yang menekan kebebasan demi kepentingan negara.
- c. Keseimbangan dan Harmoni: Negara integralistik mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Negara adalah milik bersama, yang di dalamnya tidak ada dominasi satu golongan atas golongan lain.
- d. Negara sebagai Penjaga Persatuan: Dalam pandangan Supomo, negara memiliki peran aktif sebagai penjaga persatuan bangsa, penjamin keadilan sosial, dan pelindung seluruh rakyat tanpa kecuali. Pemimpin negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama.
- e. Berdasarkan Hukum Adat dan Nilai-nilai Timur: Supomo melihat bahwa konsep integralistik ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan guyub, di mana kebersamaan dan musyawarah menjadi nilai utama, sebagaimana tercermin dalam hukum adat.

2. Lima Prinsip Dasar Negara

Berdasarkan teori negara integralistiknya, Supomo kemudian merumuskan lima prinsip dasar negara yang menjadi landasan filosofis bagi negara Indonesia merdeka.

a. Persatuan

Prinsip "Persatuan" adalah inti dari pandangan integralistik Supomo. Ia menegaskan bahwa negara haruslah sebuah entitas yang utuh dan tidak terpecah belah oleh perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Persatuan bukan hanya sekadar slogan, tetapi adalah kondisi esensial bagi kelangsungan hidup bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia. Negara harus menjadi wadah pemersatu yang mampu merangkul semua elemen, sehingga tidak ada yang merasa terpinggirkan. Persatuan ini juga berarti kesatuan kehendak dan tujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.

b. Kekeluargaan

Asas "Kekeluargaan" mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang tradisional. Supomo membayangkan negara

sebagai sebuah keluarga besar, di mana setiap anggota saling menyayangi, saling membantu, dan bertanggung jawab satu sama lain. Dalam konsep kekeluargaan, tidak ada dominasi atau penindasan, melainkan kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka. Hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah seperti orang tua dengan anak-anaknya, yang dilandasi oleh kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati. Ini adalah antitesis dari negara yang otoriter atau individualistik.

c. Keseimbangan Lahir dan Batin

Prinsip "Keseimbangan Lahir dan Batin" menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan material (lahiriah) rakyat, tetapi juga atas kesejahteraan spiritual dan mental (batiniah). Supomo menyadari bahwa kemakmuran materi saja tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan sejati. Negara harus menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan rohani, moral, dan etika warganya. Ini juga berarti adanya harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara hak dan kewajiban, serta antara dunia material dan spiritual.

d. Musyawarah

Asas "Musyawarah" adalah manifestasi dari prinsip kekeluargaan dalam pengambilan keputusan politik. Supomo menekankan bahwa keputusan-keputusan penting negara harus diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan pemaksaan kehendak mayoritas atau dominasi minoritas. Musyawarah adalah cara yang paling sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, di mana setiap suara dihargai dan setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, demi mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua. Ini adalah esensi dari demokrasi yang berlandaskan kearifan lokal.

e. Keadilan Sosial

Terakhir, "Keadilan Sosial" adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh negara integralistik. Supomo berpendapat bahwa negara harus aktif mewujudkan keadilan di segala bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun hukum. Keadilan ini harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau latar belakang. Negara tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan yang terlalu lebar atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Keadilan sosial adalah prasyarat bagi terciptanya persatuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

C. Analisis Mendalam atas Gagasan Supomo dan Relevansinya

Gagasan Supomo tentang dasar negara, khususnya teori negara integralistik, memberikan perspektif yang sangat unik dan mendalam tentang bagaimana seharusnya sebuah negara dibentuk dan dijalankan di Indonesia.

1. **Fondasi Filosofis yang Kuat:** Supomo tidak hanya sekadar mengemukakan prinsip-prinsip, tetapi juga memberikan landasan filosofis yang kuat melalui teori negara integralistiknya. Pendekatan ini menunjukkan kedalaman pemikiran beliau sebagai seorang ahli hukum tata negara.
2. **Kearifan Lokal dan Nilai-nilai Budaya:** Konsep integralistik, kekeluargaan, dan musyawarah yang diusung Supomo sangat kental dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Beliau berhasil membumikan teori negara ke dalam konteks keindonesiaan, menghindari adopsi mentah-mentah dari ideologi Barat.
3. **Menjembatani Perbedaan:** Gagasan integralistik Supomo, dengan penekanannya pada persatuan dan keseimbangan, memiliki potensi besar untuk menjembatani